Penerapan Sadd Al-Dzari'ah Dalam Penetapan Regulasi Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh

Safrijal

UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email: safrijalahmad23@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi syariat Islam di Aceh dengan fokus pada penerapan konsep sadd al-dzari'ah dalam regulasi. Sadd al-dzari'ah adalah prinsip hukum Islam yang bertujuan mencegah tindakan yang dapat mengarah pada pelanggaran hukum syariat. Implementasi regulasi syariat sering menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk regulasi syariat Islam di Aceh, menganalisis implementasi sadd al-dzari'ah dalam penetapan regulasi, serta mengevaluasi efektivitasnya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan desain deskriptif, melibatkan wawancara mendalam dengan ahli hukum Islam, ulama, pejabat pemerintah, dan masyarakat. Lokasi penelitian adalah Provinsi Aceh, yang dikenal dengan penerapan syariat Islam formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sadd al-dzari'ah di Aceh efektif dalam mencegah pelanggaran syariat dan sejalan dengan maqashid al-syari'ah, yaitu tujuan utama hukum Islam untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Meskipun demikian, terdapat perdebatan di masyarakat. Pendukung regulasi berargumen bahwa regulasi ini menjaga moral dan ketertiban, melindungi masyarakat dari perilaku terlarang seperti prostitusi online dan khalwat. Sebaliknya, kritik muncul dari pihak yang menilai regulasi terlalu restriktif, membatasi kebebasan individu, dan tidak fleksibel terhadap dinamika sosial modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun regulasi memiliki tujuan positif, implementasinya harus mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Disarankan agar dilakukan dialog intensif antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, serta evaluasi berkala untuk memastikan dampak positif tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.

Kata kunci: Sadd Al-Dzari'ah, Regulasi, Syariat Islam, Aceh

Pendahuluan

Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 451/11286 tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat merupakan kebijakan yang dikeluarkan untuk memperkuat dan meningkatkan penerapan hukum syariat Islam di Provinsi Aceh. Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberikan otonomi khusus untuk menerapkan hukum syariat Islam secara lebih luas.

Surat edaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASN di Aceh dan masyarakat umum mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip syariat

Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh, dengan harapan dapat memperkuat identitas keagamaan dan budaya masyarakat Aceh.

Dengan dikeluarkannya surat edaran ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariat Islam di Aceh, Sebagai bagian dari pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh, pemerintah Aceh telah mengesahkan beberapa qanun, di antaranya: Qanun Provinsi NAD (sekarang Provinsi Aceh) No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan berbagai fatwa melalui Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh untuk mendukung penerapan syariat Islam di Aceh. Contohnya, Fatwa MPU Aceh No. 3 Tahun 2019 tentang Hukum Game Online Player Unknown's Battle Grounds (PUBG) dan sejenisnya dalam Fiqh Islam, Taushiyah MPU Aceh No. 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, hingga Surat Edaran (SE) Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286, yang ditandatangani pada 4 Agustus 2023 tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Umum di Aceh.

Dari perspektif penerapan sadd al-dzari'ah, Fatwa MPU Aceh No. 3 Tahun 2019 tentang Hukum Game Online Player Unknown's Battle Grounds (PUBG) dan sejenisnya dalam Fiqh Islam didasarkan pada tiga pertimbangan utama. Pertama, perkembangan teknologi informasi yang pesat telah melahirkan berbagai macam permainan interaktif elektronik. Kedua, permainan interaktif elektronik seperti PUBG telah meresahkan masyarakat. Ketiga, MPU Aceh merasa perlu mengkaji secara mendalam tentang permainan PUBG dan sejenisnya karena semakin maraknya penggunaan game tersebut.

Menurut Al-Yasa' Abu Bakar, ada empat tujuan utama yang ingin dicapai dengan pelaksanaan Syariat Islam. Pertama, tujuan teologis, yaitu bahwa pelaksanaan Syariat Islam merupakan perintah agama untuk menjadi seorang muslim yang lebih sempurna, lebih baik, dan lebih dekat kepada Allah SWT. Kedua, tujuan psikologis, di mana masyarakat akan merasa aman dan tenang karena aktivitas yang berlangsung di sekitar mereka, serta kegiatan yang mereka jalani dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari sejalan dengan kesadaran dan hati nurani mereka sendiri.

Ketiga, tujuan hukum, yang memungkinkan masyarakat hidup dalam tatanan yang lebih sesuai dengan kesadaran hukum, rasa keadilan, dan nilai-nilai yang tumbuh serta berkembang di tengah masyarakat. Keempat, tujuan ekonomi dan kesejahteraan sosial, di mana nilai tambah dalam kegiatan ekonomi serta solidaritas sosial dalam bentuk tolong-menolong baik dalam kegiatan ekonomi maupun sosial akan lebih mudah terbentuk dan lebih kokoh. Dengan demikian, masyarakat diharapkan menjadi lebih rajin bekerja, lebih hemat, dan lebih bertanggung jawab (Bakar, 2005).

Sadd al-dzari'ah adalah pelarangan atas perkara yang pada dasarnya itu boleh dilakukan, agar dia tidak mengarah kepada yang tidak boleh dilakukan (Asyur, 2001). Adapun *sadd al-dzari'ah* sendiri merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif.

Jumhur ulama menempatkan metode ini dalam hukum Islam sebagai panduan untuk mengatur perilaku atau perbuatan yang memiliki aspek hukum yang belum dilakukan oleh manusia, dengan tujuan mencegah dampak negatif yang mungkin timbul. Dasar pemikiran jumhur ulama dalam menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam menangani benturan antara maslahat (kemaslahatan) dan mafsadat (kerusakan). Jika maslahat lebih dominan, maka perbuatan tersebut diperbolehkan, namun jika mafsadat lebih dominan, maka perbuatan tersebut harus dihindari. Jika kedua aspek tersebut sama-sama kuat, maka demi kehati-hatian, prinsip yang berlaku harus diikuti (Syarifuddin, 2008). Ini bukan berarti upaya untuk membatasi, melainkan salah satu tujuan hukum Islam adalah

untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (Djalil, 2014).

Sebagaimana disebutkan dalam kaidah pokok *ushul fiqh*:

الضرر يزال

Kemudharatan harus dihilangkan (Burnuwi, 2002).

درء المفسد أولى من جلب المنافع

Menolak keburukan (mafsadat) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahat) (Zuhaili, 2007).

Muhammad

Musthafa al-Zuhaili menyebutkan pengertian *sadd al-dzari'ah* adalah sebagai berikut:

الذريعة: لغة: الوسيلة، وفي الاصطلاح: عرفها ابن بدران فقال: هي ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم. فالطريق إلى الحرام حرام، مثل النظر إلى عورة المرأة، فإنه وسيلة إلى الزنا، وكلاهما حرام، وما لا يؤدي الواجب إلا به فهو واجب، فالجمعة واجبة ولا تتم إلا بترك البيع وقت الأذان، فترك البيع واجب.

Artinya: Al-Dzari'ah secara linguistik artinya jalan dan secara terminologi: Ibnu Badran mendefinisikannya: Itu adalah apa yang tampaknya diperbolehkan (mubah) dan mengarah pada sesuatu yang dilarang (haram) olehnya. Maka jalan yang menunjukkan kepada haram hukumnya haram, seperti melihat aurat seorang wanita, karena itu merupakan sarana zina, maka kedua-duanya haram, dan suatu yang wajib tidak dapat dilakukan tanpanya, maka jalan itu hukumnya wajib. Maka shalat jumat hukumnya wajib dan tidak dapat dilakukan kecuali dengan meninggalkan jual beli pada saat azan, maka meninggalkan jual beli itu wajib (Al-Zuhaili, 2007).

Salah satu konsep penting dalam penerapan hukum syariat di Aceh adalah konsep “sadd al-dzari’ah.” Sadd al-dzari’ah mengacu pada larangan dan upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya maksiat atau perilaku dosa dalam masyarakat. Konsep ini mencakup larangan terhadap minuman beralkohol, perjudian, hubungan gelap, dan praktik-praktik yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Penerapan sadd al-dzari’ah di Aceh mencakup berbagai aturan dan peraturan yang mencerminkan prinsip-prinsip konsep ini.

Konsep sadd al-dzari’ah juga melahirkan sistem peradilan syariat yang berfungsi menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum syariat. Sistem peradilan ini melibatkan pengadilan khusus yang dikenal sebagai Mahkamah Syar’iyah. Seiring dengan implementasi hukum

syariat dan konsep sadd al-dzari'ah, Aceh telah mengalami perubahan dalam perilaku sosial, budaya, dan praktik masyarakat. Dampaknya terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, perdagangan, budaya, dan tata cara sosial.

Dalam membuat regulasi, pemerintah Aceh sangat memperhatikan penerapan sadd al-dzari'ah pada setiap Qanun yang ditetapkan. Contohnya, Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Seni Budaya dan Hiburan Lainnya dalam Pandangan Syariat Islam menetapkan berbagai hal terkait hiburan masyarakat. Salah satu ketentuan yang diatur adalah kriteria seni budaya dan hiburan lainnya yang diperbolehkan dalam syariat Islam, dengan syarat-syarat tertentu:

1. Syair dan nyanyian tidak menyimpang dari aqidah ahlu sunnah wal jamaah;
2. Syair dan nyanyian tidak bertentangan dengan hukum Islam;
3. Syair dan nyanyian tidak disertai dengan alat-alat musik yang diharamkan seperti bass, piano, biola, seruling, gitar dan sejenisnya;
4. Syair dan nyanyian tidak mengandung fitnah, dusta, caci maki dan yang dapat membangkitkan nafsu syahwat;
5. Penyair dan penyanyi harus memenuhi kriteria busana muslim dan muslimah;
6. Penyair dan penyanyi tidak melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan atau dapat menimbulkan nafsu birahi;
7. Penyair dan penyanyi tidak bergabung/bercampur laki-laki dan perempuan yang bukan mahram;
8. Penyair dan penyanyi tidak menyalahi kodratnya sesuai dengan jenis kelamin;
9. Penyair dan penyanyi tidak ditonton langsung oleh lawan jenis yang bukan mahram;
10. Kegiatan bernyanyi dan bersyair dilakukan pada tempat dan waktu yang tidak mengganggu ibadah dan ketertiban umum;
11. Penonton hiburan tidak bercampur laki-laki dan perempuan yang bukan mahram;

12. Seni rupa dan seni pahat tidak membentuk wujud tubuh manusia dan hewan yang utuh serta sempurna;
13. Seni ukir tubuh dan wajah tidak melukai, tidak mengganggu kesehatan, tidak memakai kalimah-kalimah suci (al-Qur'an dan Hadis) dan tidak menghambat sampainya air untuk bersuci;
14. Seni bela diri tidak melukai, mencederai serta harus menjaga ketentuan-ketentuan syariat Islam;
15. Umat Islam diharamkan memajang barang-barang berbentuk patung manusia dan hewan di dalam rumah, toko dan lain-lain, kecuali untuk alat bermain bagi anak-anak.

Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah peraturan hukum pidana Islam yang diterapkan kepada seluruh masyarakat Aceh, baik yang beragama Islam maupun non-Islam, berdasarkan nilai dan norma syariat Islam. Hukuman yang diterapkan berdasarkan Qanun ini meliputi denda, penjara, dan hukuman cambuk. Qanun Jinayat memiliki kekhasan dibandingkan hukum lainnya, yakni penerapan hukuman cambuk bagi pelanggar, yang menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dan masyarakat Aceh dalam melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh.

Tujuan dari Qanun No. 6 Tahun 2014 adalah untuk mengarahkan kehidupan masyarakat dalam kerangka syariat Islam dan menekan angka pelanggaran terhadap syariat. Keunikan Qanun Jinayat terletak pada pemberian sanksi hukuman cambuk, yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan sebagai edukasi bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan Islam. Meskipun telah diterapkan selama lima tahun, implementasi Qanun ini masih menghadapi tantangan, terlihat dari tingginya jumlah pelanggaran.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 3 Tahun 2019 menyatakan bahwa game online PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) dan sejenisnya haram dalam pandangan Fiqh Islam. Game ini dianggap mengandung unsur kekerasan, kebrutalan, serta mempengaruhi perilaku negatif, seperti kecanduan dan penghinaan terhadap simbol-simbol Islam. Surat Edaran (SE) Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286, yang

diterbitkan pada 4 Agustus 2023, berfokus pada penguatan pelaksanaan syariat Islam bagi ASN dan masyarakat umum di Aceh. SE ini mengimbau untuk mengaktifkan pengajian di meunasah, meningkatkan pengawasan media, dan meminta pelaku usaha untuk mematuhi aturan syariat Islam, termasuk larangan operasional warung kopi setelah pukul 00:00 WIB. Kebijakan ini mendapat reaksi beragam dari masyarakat, dengan beberapa pihak mendukung sebagai upaya melestarikan syariat Islam, sementara yang lain menganggapnya berlebihan dan berpotensi menimbulkan keresahan. Pemerintah Aceh, melalui SE ini, berupaya mencegah kerusakan dan memastikan pelaksanaan Qanun Syariat Islam, meskipun konsep sadd al-dzari'ah dalam SE ini belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori yuridis empiris, yang mengkaji ketentuan hukum normatif dalam konteks nyata di masyarakat. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi saat ini, melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, pemerintah, dan ulama, serta observasi dan studi dokumenter. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan informan kunci, seperti tokoh masyarakat dan akademisi, serta pengguna dan penyedia layanan ojol. Data sekunder mencakup dokumen resmi, buku, dan laporan penelitian yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam untuk memahami alasan di balik keputusan responden, serta studi dokumenter untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen yang relevan dengan penelitian. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan normatif menggunakan teori hukum Islam, khususnya konsep sadd al-dzari'ah. Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan hukum terkait kebijakan penerapan syariat Islam di Aceh. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menyusun kesimpulan mengenai kebijakan tersebut.

Pembahasan/hasil

A. Bentuk-Bentuk Regulasi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

Hierarki regulasi atau peraturan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Pasal 7 menyebutkan bahwa.

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
 - c. Peraturan Pemerintah.
 - d. Peraturan Presiden.
 - e. Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama gubernur.
 - b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.
 - c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Bentuk-bentuk regulasi di Aceh ada dua macam: ada regulasi mengikat dan ada regulasi tidak mengikat. Regulasi mengikat adalah qanun dan sedangkan regulasi yang tidak mengikat adalah fatwa MPU dan SE Gubernur.

1. Regulasi mengikat

Sebagai bentuk pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh, pemerintah Aceh telah mengesahkan beberapa qanun, antara lain: Qanun Provinsi NAD (sekarang Provinsi Aceh) No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam; Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya; Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian); Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang khalwat (mesum); Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat; Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS); dan lainnya. Dengan demikian, terdapat banyak regulasi dalam

qanun Aceh mengenai syariat Islam. Dalam penelitian ini, saya hanya menyebutkan sembilan regulasi. Sembilan regulasi yang disebutkan dalam penelitian ini sudah melengkapi regulasi tentang syariat Islam.

Istilah qanun dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja “qanna,” yang berarti membuat hukum. Ridwan menjelaskan bahwa dalam bahasa Arab, kata kerja qanun adalah “qanna,” yang artinya membuat hukum (to make law, to legislate). Dalam perkembangannya, kata qanun berarti hukum (law), peraturan (rule, regulation), dan undang-undang (statute, code) (Ridwan, 2014). Sumber lain, Efendi merujuk pada Mohd. Din, menjelaskan bahwa “kanon” berasal dari kata Yunani kuno yang berarti buluh. Oleh karena itu, penggunaan “buluh” dalam kehidupan sehari-hari pada zaman itu adalah untuk mengukur, maka kanon juga berarti sebatang tongkat atau kayu pengukur (Idris, 2014). Lebih lanjut, Ridwan merujuk pada A. Qodri Azizy menjelaskan bahwa istilah qanun sebagai terminologi hukum sudah dipakai oleh al-Mawardi dalam kitabnya “al-Ahkam al-Sultaniyah.” Dalam praktiknya, penggunaan kata qanun digunakan untuk menunjukkan hukum yang berkaitan dengan masyarakat (mu’amalat bayna al-nas), bukan ibadah.

Selain itu, istilah qanun juga digunakan untuk dokumen-dokumen yang bernuansa hukum, seperti daftar (list), rekaman pajak tanah (register and list recording land taxes). Mahmassani dalam bukunya menyebutkan tiga macam makna qanun (Solly Lubis, 2005):

- a. Kodifikasi hukum (kitab undang-undang) seperti qanun pidana Libanon (KUHP Turki Usmani, KUH Perdata Libanon, dll).
- b. Sebagai istilah padanan untuk hukum ilmu qanun, qanun Islam berarti Hukum Islam. Qanun NAD berarti Peraturan Daerah (Perda) Nanggroe Aceh Darussalam.
- c. Undang-Undang.

Perbedaan antara yang pertama dengan yang ketiga adalah pada sifatnya. Yang pertama bersifat lebih umum, sementara yang ketiga lebih khusus, seperti undang-undang yang khusus mengatur tentang perkawinan. Secara terminologi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, qanun adalah ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan

digunakan untuk kepentingan umum. Qanun tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga mencakup aspek muamalah antar sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pengertian qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “kanun,” yang berarti undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum, dan kaidah. Sementara itu, dalam kamus Bahasa Arab, qanun berarti undang-undang, kebiasaan, atau adat (Ali & Muhdlor, 1998). Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah, dalam hal ini Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Di masyarakat Aceh, istilah qanun untuk suatu aturan hukum atau penamaan adat telah lama digunakan dan menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang disebut dengan qanun. Qanun biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.

Ketentuan mengenai qanun terdapat dalam Pasal 1 angka 21 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyatakan bahwa qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Produk dari qanun ini harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh, seperti tidak boleh bertentangan dengan aqidah, syar'iyah, dan akhlak, yang dalam penjabarannya mencakup:

- a. Ibadah.
- b. Ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga).
- c. Muamalah (hukum perdata).
- d. Jinayah (hukum pidana).
- e. Qadha (peradilan).
- f. Tarbiyah (pendidikan).
- g. Dakwah.
- h. Syiar.
- i. Pembelaan Islam.

Berdasarkan hasil penelitian tentang kedudukan dari qanun ini, dapat disimpulkan bahwa pengertian qanun dapat saja dianggap sebagai semacam serupa dengan Perda, tetapi dari segi isinya berbeda, karena qanun mempunyai keistimewaan yang tidak dipunyai oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

2. Regulasi yang tidak mengikat

Disamping regulasi mengikat di atas pemerintah juga mengeluarkan berbagai fatwa-fatwa melalui Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh untuk mendukung penerapan syariat Islam di Aceh, seperti Fatwa MPU Aceh No. 3 tahun 2019 tentang Hukum Game Online *Player Unknown's Battle Grounds* (PUBG) dan sejenisnya dalam fiqh Islam, Tausiyah MPU Aceh No. 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Adapun kedudukan fatwa MPU di Aceh adalah sebagai mitra sejajar pemerintah dan DPRA. Dalam makna yang sederhana, hubungan mitra sejajar atau hubungan kemitraan merupakan hubungan pasangan kerja yang memiliki hak atau kedudukan yang sama. Meminjam pendapat Suparto Wijoyo, bahwa hubungan kemitraan ini seperti DPRD dan Pemerintah Daerah. Maknanya bahwa keduanya memiliki kedudukan yang setara, sama, dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi (Wijoyo, 2009).

Demikian pula kedudukan MPU Aceh dengan pihak pemerintah Aceh atau eksekutif dengan DPRA atau legislatif, ketiganya memiliki kedudukan sebagai hubungan kemitraan, tidak saling membawahi, namun saling mengisi. Ketentuan bahwa MPU Aceh sebagai mitra dari Pemerintah Aceh dan DPRA ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu Pasal 138: Ayat (1) : MPU dibentuk di Aceh/kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Ayat (2) : MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama. Ayat (3) : MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRA dan DPRK. Ayat (4) : Ketentuan

lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, kedudukan protokoler, dan hal lain yang berkaitan dengan MPU diatur dengan Qanun Aceh.

Ada beberapa langkah dalam beristidlal untuk mengeluarkan fatwa hukum sesuai dengan empat mazhab dalam koridor Ahlussunnah Waljama'ah yang menjadi pegangan oleh MPU Aceh yaitu (Muchtar, 2023):

- a. Al-Qur'an
- b. Sunnah
- c. Ijma'
- d. Qiyas
- e. *Istihsan*
- f. *Istishlah*
- g. *Istishab*
- h. *'urf*
- i. *Sadd al-Dzari'ah*
- j. *Syar'u Man Qablana*
- k. Mazhab Shahabi/Qaul Shahabi

Selain fatwa MPU, pemerintah juga mengeluarkan beberapa surat edaran untuk memperkuat pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Surat Edaran (SE) pertama adalah Nomor 451.1/21770 Tahun 2018, yang berfokus pada Penguatan Syariat Islam di Aceh. SE ini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kewajiban berpakaian Islami, penguatan ibadah, dan penutupan tempat hiburan selama bulan Ramadan.

Surat Edaran kedua adalah Nomor 451.2/7586 Tahun 2016, yang berisi tentang Penegakan Syariat Islam di Bulan Suci Ramadan. SE ini mengatur penutupan sementara tempat-tempat hiburan, pengawasan jam operasional restoran dan warung makan, serta imbauan untuk meningkatkan ibadah selama Ramadan. Surat Edaran ketiga adalah Nomor 451.1/15370 Tahun 2014, yang mewajibkan seluruh pegawai negeri dan masyarakat di Aceh untuk mengenakan pakaian sesuai dengan syariat Islam. Wanita diwajibkan mengenakan hijab, sedangkan pria diharuskan mengenakan pakaian yang sopan dan menutup aurat.

Surat Edaran keempat adalah Nomor 451.1/8150 Tahun 2019, yang mengimbau seluruh pegawai negeri dan masyarakat untuk melaksanakan

salat berjamaah di masjid, khususnya salat Jumat dan salat lima waktu. Selain itu, SE ini mendorong masjid-masjid untuk aktif mengadakan pengajian dan kegiatan keagamaan. Terakhir, ada Surat Edaran Pejabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286 yang ditandatangani pada 4 Agustus 2023. SE ini berfokus pada Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat secara umum di Aceh, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Surat Edaran ini dikeluarkan dengan berpedoman pada dan untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Syariat Islam. SE ini mengatur lima sasaran utama untuk memperkuat dan meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam bagi ASN dan masyarakat di Aceh, seperti patroli rutin, pengawasan media, bimbingan pelaksanaan Syariat Islam, memastikan tidak terjadinya pelanggaran di tempat usaha, serta mendidik anggota keluarga dalam pemahaman dan pelaksanaan Syariat Islam.

Dari cakupan isi SE tersebut dapat ditemukan bahwa ada beberapa implikasi penting dan memerlukan perhatian khusus yaitu:

a. Patroli Rutin oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah:

Patroli rutin yang diinstruksikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah bertujuan untuk memastikan penegakan keputusan-keputusan dan peraturan yang berlaku di Aceh, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaan aturan-aturan syariah secara konsisten. Namun, keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada profesionalisme dan pendekatan humanis dari petugas dalam menjalankan tugas mereka.

b. Pengawasan Media oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh:

Tugas meningkatkan pengawasan terhadap konten televisi, radio, dan media cetak agar sesuai dengan norma agama dan adat istiadat Aceh

bertujuan untuk menjaga moral dan akhlak masyarakat. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan melalui media tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Aceh. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara pengawasan konten dan kebebasan pers serta hak untuk mengakses informasi yang beragam.

c. Peran Aktif Bupati/Walikota dan Keuchik:

Instruksi kepada Bupati/Walikota dan Keuchik untuk mengembangkan, membimbing, serta mengawasi pelaksanaan Syariat Islam adalah langkah strategis untuk memperkuat implementasi di tingkat lokal. Memaksimalkan fungsi Meunasah/Mushalla untuk kegiatan pengajian dan dakwah, terutama setelah maghrib, dapat membantu dalam mendidik generasi muda tentang nilai-nilai Islam. Tantangan utama adalah memastikan partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat serta keberlanjutan program-program tersebut.

d. Tanggung Jawab Pelaku Usaha:

Pelaku usaha diharapkan berperan dalam mencegah pelanggaran Syari'at Islam di tempat usaha mereka, seperti menghentikan kegiatan yang mengganggu saat adzan dan membatasi jam operasional warung kopi, kafe, dan sejenisnya. Ini merupakan langkah yang signifikan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan ibadah dan ketertiban umum. Namun, perlu ada dialog yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak berdampak negatif terhadap perekonomian lokal.

e. Penerapan Syari'at Islam oleh ASN dan Masyarakat:

Imbauan kepada ASN dan masyarakat untuk melaksanakan Syari'at Islam dalam seluruh aspek kehidupan menunjukkan tekad pemerintah untuk memperkuat moral dan akhlak dalam komunitas. Penekanan pada pendidikan anak-anak tentang Syari'at Islam sejak dini serta menjaga perilaku sesuai dengan ajaran Islam merupakan langkah penting untuk membangun generasi yang taat agama. Implementasi yang efektif membutuhkan pendekatan pendidikan yang inklusif dan pengawasan yang bijaksana.

B. Penerapan *Sadd al-Dzari'ah* oleh Pemerintah dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 451/11286 tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum di Aceh merupakan langkah preventif yang diambil pemerintah untuk memperkuat qanun pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Regulasi ini juga menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, dengan tujuan menjaga mereka dari hal-hal yang tidak baik. Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk. Dr. Muhibbut Thabari, menjelaskan bahwa SE ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu konsep *sadd al-dzari'ah*, dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan nilai-nilai Islam.

Dekstro Alfa, S.H., M.H., menyampaikan bahwa SE Gubernur Aceh Nomor 451/11286 adalah langkah konkret dari pemerintah Aceh untuk memperkuat pelaksanaan Syariat Islam di wilayah tersebut, dengan berpedoman pada rekomendasi dan panduan dari MPU Aceh. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih religius, bermoral, dan taat pada nilai-nilai Islam, serta menjaga kemaslahatan dan ketertiban umum. Melalui implementasi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, kebijakan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat Aceh.

Abdul Razak, S.Ag., MA., juga menekankan bahwa Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 451/11286 adalah upaya pemerintah Aceh untuk memperkuat pelaksanaan Syariat Islam dengan berpedoman pada rekomendasi dari Dinas Syariat Islam Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Meskipun demikian, dari sisi penerapan konsep *sadd al-dzari'ah*, pemerintah dinilai belum mengaplikasikannya secara sempurna, yang terlihat dari respon masyarakat yang beragam dan adanya pro dan kontra. Beberapa masyarakat enggan mematuhi SE tersebut, sementara pemerintah juga belum mampu memberikan hukuman atau melakukan revisi. Pendukung SE ini, seperti Tgk. H. Irawan Abdullah, anggota DPR Aceh, berharap agar pelaksanaannya dapat menyeluruh dan maksimal di

seluruh masyarakat Aceh, serta menekankan pentingnya peran ASN sebagai contoh dalam penerapan syariat Islam sehari-hari. (Herman, 2023).

Dukungan dari kalangan akademisi dan tokoh agama yang mendukung SE ini menganggapnya sebagai langkah positif dalam memperkuat pelaksanaan Syariat Islam. Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, Rektor IAIN Langsa, juga mendukung SE ini, dia menyebutnya sebagai langkah positif untuk memperkuat nilai-nilai Islam di Aceh dan mendorong agar masyarakat serta institusi pendidikan Islam aktif mendukung kebijakan tersebut (Zubir, 2023). Rektor UIN Ar-Raniry juga menyatakan bahwa SE ini sejalan dengan upaya memperdalam nilai-nilai Islam di Aceh dan seharusnya disambut baik oleh masyarakat serta institusi pendidikan Islam (Arkin, 2023).

Selain itu, Prof. Syamsul Rijal juga merupakan Guru Besar di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, menyebutkan bahwa SE ini adalah bentuk penguatan nilai-nilai Syariat Islam yang sudah lama diterapkan di Aceh. Menurutnya, SE ini bukan sebuah kemunduran tetapi penguatan yang diperlukan untuk mempertahankan identitas Islam di Aceh (Ramadhan, 2023).

Sebaliknya, beberapa pihak mengkritik Surat Edaran (SE) ini dengan menyoroti beberapa aspek yang dinilai tidak bisa diabaikan oleh pemerintah. Selain sebagai pembuat dan penegak aturan, pemerintah juga harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah harus mampu menjaga kestabilan ekonomi, sosial, dan politik di masyarakat. SE ini dianggap tidak cukup mengakomodasi dan menjawab permasalahan yang ada, malah dinilai dapat menimbulkan masalah baru dalam aspek sosial, budaya, dan ekonomi di Aceh.

Direktur Katahati Institute, Raihal Fajri, menyebut bahwa beberapa poin dalam SE, seperti larangan berduaan bagi yang bukan muhrim di kendaraan, dapat berdampak negatif pada perekonomian, khususnya sektor ojek online, serta membatasi mobilitas perempuan. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini bisa mengganggu kehidupan sehari-hari dan menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya, seperti yang disampaikan oleh Wardisi (Wardisi, 2023).

Politisi dari Partai Gerindra, Zulhafah Tgk Hasan, menilai bahwa pembatasan jam operasional warung kopi hingga pukul 00:00 WIB dapat merugikan pengusaha lokal dan mengurangi aktivitas ekonomi. Pembatasan ini juga dikhawatirkan akan meningkatkan risiko kriminalitas karena jalanan yang lebih sepi pada malam hari, seperti yang dijelaskan oleh Redaksi (Redaksi, 2023). Sementara itu, Nahrawi Noerdin, Ketua Hiswana Migas Aceh, menyatakan bahwa kebijakan ini diambil tanpa pengkajian dan musyawarah dengan pelaku usaha di Aceh. Ia menekankan bahwa banyak warung dan SPBU yang beroperasi hingga dini hari untuk melayani kebutuhan masyarakat, termasuk sopir dan penumpang yang membutuhkan tempat beristirahat dan makan (Danirandi, 2023).

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada awalnya didasarkan pada fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), yang merupakan hasil ijtihad mengenai potensi keburukan dan kebaikan. Fatwa tersebut kemudian dilegalisasi oleh pemerintah melalui Surat Edaran (SE) Gubernur atau diubah menjadi qanun oleh legislatif agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tujuan dari proses ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap fatwa MPU. Beberapa regulasi yang dihasilkan mencakup fatwa MPU tentang hukum game online PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), tausiyah MPU Aceh No. 3 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, serta berbagai qanun mengenai pelaksanaan Syariat Islam dan pengaturan lainnya. Regulasi-regulasi ini dibuat berdasarkan ajaran Islam, termasuk prinsip *sadd al-dzari'ah* yang bertujuan untuk menghalangi segala hal yang dapat menimbulkan kerusakan. Penerapan prinsip ini dalam regulasi diharapkan dapat mencegah keburukan dan melindungi masyarakat dari potensi kerusakan.

C. Analisis *Sadd al-dzari'ah* dalam Penetapan Regulasi Syariat Islam di Aceh

Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh, seperti Surat Edaran Gubernur Nomor 451/11286, bertujuan untuk mencegah kemungkaran atau kerusakan dalam masyarakat. Contohnya adalah larangan membuka warung kopi setelah pukul 00:00 malam, yang

bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan seperti malas bekerja esok hari, pelanggaran terhadap aturan agama, serta potensi kejahatan lainnya seperti prostitusi online, judi online, khalwat, dan miras. Dengan demikian, penerapan konsep sadd al-dzari'ah terlihat dalam upaya pemerintah Aceh untuk mencegah potensi kerusakan atau kemungkaran yang dapat terjadi.

Respon masyarakat terhadap regulasi yang diterapkan oleh pemerintah dan penerapan Syariat Islam di Aceh bervariasi. Ada yang mendukung langkah-langkah pemerintah dalam memperkuat pelaksanaan syariat Islam, menganggapnya sebagai upaya serius untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Namun, ada juga kritik dari beberapa pihak yang menilai bahwa beberapa aspek regulasi tersebut belum terakomodasi dengan baik, seperti dampak ekonomi dan sosial dari pembatasan-pembatasan yang diterapkan.

Meskipun regulasi-regulasi tersebut didasarkan pada konsep sadd al-dzari'ah untuk mencegah kemungkaran, kritik muncul terkait penerapan konsep ini. Beberapa pihak menilai bahwa beberapa larangan atau pembatasan yang diterapkan dapat mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat dan bahkan menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Misalnya, larangan berduaan bagi yang bukan muhrim di kendaraan dapat membatasi mobilitas perempuan, dan larangan operasional warung kopi hingga pukul 00:00 WIB dapat merugikan pengusaha lokal dan mengurangi aktivitas ekonomi. Kolaborasi antara pemerintah Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam pembuatan regulasi ini sangat penting, karena peran ulama dalam memberikan fatwa atau panduan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menetapkan regulasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Namun, meskipun pemerintah telah mengeluarkan SE sebagai upaya serius untuk memperkuat pelaksanaan syariat Islam, tantangan dalam menangani berbagai kasus pelanggaran masih ada.

Kasus-kasus seperti prostitusi online yang terjadi di Aceh masih kian banyak terjadi hingga Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banda Aceh mengungkap kasus prostitusi online dan menangkap tiga orang

terduga pelaku di salah satu warung kopi di wilayah hukum setempat (Fajri, 2023), seorang pria di Aceh Utara melakukan pemerkosaan terhadap anak tirinya yang masih berusia 8 tahun (Setiadi, 2024), penangkapan terhadap oknum PNS dan temannya di Aceh Timur yang sedang bermain game online di warung kopi (Redaksi, 2024), bahkan penyalahgunaan narkoba seperti sabu-sabu, masih sering terjadi meskipun adanya SE tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang dikeluarkan belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan yang ada di lapangan.

Terdapat beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab belum maksimalnya efektivitas SE Gubernur dalam penguatan syariat Islam di Aceh:

- a. Ketidaktepatan Implementasi: Kemungkinan regulasi yang dikeluarkan belum diimplementasikan secara tepat atau belum dilakukan dengan konsistensi yang memadai oleh aparat penegak hukum.
- b. Keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya sumber daya manusia, anggaran, atau infrastruktur yang memadai dalam menangani kasus-kasus pelanggaran syariat dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum.
- c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Belum terciptanya kesadaran yang cukup di kalangan masyarakat tentang pentingnya menjalankan aturan syariat Islam, sehingga masih terdapat kecenderungan untuk melanggar hukum.
- d. Kehadiran Tantangan Baru: Adanya tantangan baru seperti perkembangan teknologi yang memungkinkan praktik-praktik pelanggaran syariat dilakukan secara daring, seperti prostitusi online dan judi online.

Mengakui bahwa masih terdapat tantangan dalam menegakkan syariat Islam di Aceh, pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap implementasi Surat Edaran (SE) tersebut dan memperkuat upaya penegakan hukum yang lebih efektif. Selain itu, langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan aturan syariat Islam dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap nilai-nilai agama dan moralitas juga perlu diperkuat.

Konsep sadd al-dzari'ah sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak hal yang dapat menjadi jalan menuju keburukan dalam masyarakat, sehingga jalan-jalan tersebut perlu ditutup atau dihalangi agar tidak terjadi keburukan. Ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya, bukan bentuk penindasan atau penganiayaan. Jika jalan menuju keburukan tidak ditutup, tentu banyak keburukan yang dapat terjadi dalam masyarakat, khususnya di Aceh yang mayoritas penduduknya mematuhi syariat Islam.

Oleh karena itu, sadd al-dzari'ah perlu dianalisis lebih mendalam dan luas agar ruang lingkungannya dapat diketahui. Ketika ruang lingkup sadd al-dzari'ah telah diketahui, pemerintah dapat membuat regulasi terkait jalan-jalan yang mengarah pada keburukan. Semua jalan yang mengarah pada keburukan perlu ditutup dengan peraturan-peraturan yang mengikat atau tidak mengikat. Aceh, sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus dalam penerapan syariat Islam, harus memperhatikan konsep sadd al-dzari'ah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Penerapan sadd al-dzari'ah dalam regulasi sudah banyak dilakukan di Aceh, seperti larangan membuka warung kopi hingga tengah malam untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Kesimpulan

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa penerapan konsep sadd al-dzari'ah dalam regulasi di Aceh telah menjadi upaya penting untuk mencegah kemungkaran atau kerusakan sosial. Contoh konkret dari penerapan ini adalah larangan operasional warung kopi setelah pukul 23:00 untuk mencegah potensi masalah seperti penurunan produktivitas kerja, pelanggaran agama, dan kejahatan seperti prostitusi dan perjudian online. Meskipun ada dukungan terhadap langkah-langkah ini sebagai upaya memperbaiki kualitas hidup berdasarkan prinsip syariat Islam, terdapat juga kritik terkait dampak ekonomi dan sosial dari pembatasan tersebut, termasuk potensi ketidakadilan dalam penerapan larangan. Kolaborasi antara pemerintah Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dianggap esensial untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat sesuai

dengan prinsip syariat Islam. Namun, tantangan tetap ada, termasuk implementasi yang tidak konsisten, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, serta kurangnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya analisis lebih mendalam dan pembuatan fatwa atau regulasi khusus untuk menghadapi tantangan baru, serta pentingnya sadd al-dzari'ah dalam mencegah potensi keburukan. Meskipun demikian, penerapan sadd al-dzari'ah di Aceh sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.

Daftar Pustaka

- Al-Zuhaili, M. M. (2007). *Al Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar Al-Khair.
- Ali, A., & Muhdlor, A. Z. (1998). *Kamus Al-'Ashri Arab-Indonesia*. Multi Karya Grafika.
- Arkin. (2023). *Rektor UIN Ar-Raniry Dukung Surat Edaran Pj Gubernur Aceh*. Ar-Raniry.Ac.Id. <https://ar-raniry.ac.id/2023/08/rektor-uin-ar-raniry-dukung-surat-edaran-pj-gubernur-aceh/>
- Asyur, M. T. I. (2001). *Maqasid Syari'ah al-Islamiyyah*. Dar An-Nafais.
- Bakar, A. A. (2005). *Syari'at Islam di Provinsi NAD, Pradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD.
- Burnuwi, M. S. bin A. bin M. Al. (2002). *Al Wajiz Fi Iydhah Qawaid al Fiqh al Kuliyyah*. Muasasah ArRisalah.
- Danirandi. (2023). *PJ Gubernur Diminta Kaji Ulang SE Pembatasan Jam Malam Bagi Pelaku Usaha*. Kanalaceh.Com. <https://www.kanalaceh.com/2023/08/16/pj-gubernur-diminta-kaji-ulang-se-pembatasan-jam-malam-bagi-pelaku-usaha/>
- Devayan, A., & Hamzah, M. (2007). *Polemik Penerapan Syari'at Islam di Aceh*. Yayasan Insan Citra Madani.
- Djalil, B. (2014). *Ilmu Usul Fiqh*. Kencana Group.
- Fajri, R. (2023). *Polresta ungkap kasus prostitusi online di Banda Aceh*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/3684270/polresta-ungkap-kasus-prostitusi-online-di-banda-aceh>
- Herman, S. M. H. (2023). *Keluarkan SE Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam, Tgk Irawan Abdullah Apresiasi Pj Gubernur Aceh*. Kabarnanggroe.Com.

<https://www.kabarnanggroe.com/08/08/2023/keluarkan-se-penguatan-dan-peningkatan-pelaksanaan-syariat-islam-tgk-irawan-abdullah-apresiasi-pj-gubernur-aceh/>

Idris, E. (2014). Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), 25–35. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.274>

Muchtar, N. (2023). Metode Fatwa MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9(1), 16–38. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.865>

Ramadhan, A. (2023). *Pro Kontra SE Gubernur Aceh, Prof Syamsul Sebut Sebagai Penguatan Syariat Bukan Kemunduran BerIslam*. Serambinews.Com. <https://aceh.tribunnews.com/2023/08/10/pro-kontra-se-gubernur-aceh-prof-syamsul-sebut-sebagai-penguatan-syariat-bukan-kemunduran-berislam>

Redaksi. (2023). *Pro Kontra Surat Edaran Pj Gubernur Aceh, Zulfah Tgk Hasan: Coba Cari Solusinya*. Aceh Monitor.Com. <https://acehmonitor.com/pro-kontra-surat-edaran-pj-gubernur-aceh-zulhafah-tgk-hasan-coba-cari-solusinya/>

Redaksi, T. (2024). *Asyik Judi Online, Oknum PNS di Aceh Timur Ditangkap Polisi*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2024/04/27/202800678/asyik-judi-online-oknum-pns-di-aceh-timur-ditangkap-polisi>

Ridwan, R. (2014). Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No: 14/2003 tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nangroe Aceh Darussalam). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 281–294. <https://doi.org/10.24090/mnh.v8i2.413>

Sanata, Y. R. A. (2023). Urgensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Mengatasi Masalah Perekonomian Indonesia. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(3), 656–665. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i3.390>

Setiadi, A. (2024). *Perkosa Anak Tiri, Pria di Aceh Utara Melawan saat Ditangkap Polisi*. Detik.Com. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7250518/perkosa-anak-tiri-pria-di-aceh-utara-melawan-saat-ditangkap-polisi>

Solly Lubis, M. (2005). Aceh Mencari Format Khusus. *Jurnal Hukum*, 1(1), 2005.

Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh*. Kencana.

Wardisi, A. (2023). *Katahati Institute: Kebijakan Pembatasan Aktivitas Sosial di Aceh Tidak Inklusif*. Acehkini.ID. <https://acehkini.id/katahati-institute-kebijakan-pembatasan-aktivitas-sosial-di-aceh-tidak-inklusif/>

- Wijoyo, S. (2009). *Otonomi Tanpa Politik Ekologi: Catatan Atas Dinamika Otonomi*. Airlangga University Press.
- Zubir. (2023). *Rektor IAIN Langsa Dukung Surat Edaran Pj Gubernur Aceh tentang Penguatan Syariat Islam*. Serambinews.Com. <https://aceh.tribunnews.com/index.php2023/08/13/rektor-iain-langsa-dukung-surat-edaran-pj-gubernur-aceh-tentang-penguatan-syariat-islam>
- Zuhaili, M. az. (2007). *Al Qawaid al Fiqhiyah wa Tathbiqaha fi al Madzahib al Arba'ah*. Darul Fikri.